

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anto, J. & Pemilianna Pardede (ed.), 2007, *Meretas Jurnalisme Damai Di Aceh: Kisah Reintegrasi Damai Dari Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Burnett, Robbin & Vivienne Bath, 2009, *Law of International Business in Australasia*, The Federation Press, Leichhardt, New South Wales.
- Chern, Cyril, 2015, *the Commercial Mediator's Handbook*, Informa Law from Routledge, New York.
- Efendi, Jonaedi & Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, cet. ke-2.
- Fitrah, Muhammad & Luthfiyah, 2017, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jejak, Sukabumi.
- Habermas, Jurgen, 1989, *Toward A Rational Society: Student Protest, Science, And Politics*, Beacon Press, London.
- Hocker, Joyce L. & William W. Wilmot, 1991, *Interpersonal Conflict*, W.C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa, cet.ke-3.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta.
- Kreps, Gary L., 1986, *Organizational Communication: Theory and Practice*, Longman, New York.
- Liliweri, Alo 2018, *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya*, Kencana, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Loots, Philips & Donald Charret, 2009, *Practical Guide to Engineering and Construction Contracts*, McPherson's Printing Group, Maryborough.
- Newstrom, John W. & Keith Davis, 1977, *Organizational Behavior: Human Behavior At Work*, Boston, McGraw-Hill Companies, Massachusetts, cet. ke-10.
- Pattaro, Enrico & Corrado Roversi (Ed.), 2016, *A Treatie of Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol. 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World*, Springer Nature, London.

- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kecana, Jakarta
- Rijkschroeff, B.R., 2001, *Sosiologi Hukum Dan Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Freddy Tengker, Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta.
- Soeharto, Bambang W., 2013, *Menangani Konflik Di Indonesia*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia – UI Press, Jakarta, cet. ke-3
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, cet. ke-16
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, cet. ke-2.
- Usman, Rachmadi, 2012, *Media Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyudi, 2008, *Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung, cet. ke-3
- Winarta, Frans Hendra, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, ed ke-3, cet. ke-1.
- Wiranata, I. Gede A. B., 2005, *Hukum adat di Indonesia: perkembangan dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirawan, 2009, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, cet. ke-2.

## B. Karya Ilmiah / Makalah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I., *Pedoman Investor, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Areal Penggunaan Lain / APL)*, 27 Februari 2015.

Agus Marzuki, 2016, *Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung Dalam Perspektif Keadilan*, disertasi yang dipertahankan dalam sidang program doktor ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pusat Pengkajian Hukum dan *The Jakarta Initiative*, Lokakarya Terbatas, *Teknik Mediasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003

## C. Tautan Online

Badan Pusat Statistik, *Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia menurut provinsi berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31%2000:00:00/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>

Info Hukum, *Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat*, [http://www.info-hukum.com/2018/02/05/masyarakat-adat-dan-masyarakat-hukum-adat/#\\_ftnref11](http://www.info-hukum.com/2018/02/05/masyarakat-adat-dan-masyarakat-hukum-adat/#_ftnref11)

## D. Perjanjian

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. X, 20 November 1997.

## E. Putusan

-----. Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

-----. Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

-----. Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku.

## **F. Peraturan Perundang-Undangan**

-----. Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah dengan perubahan Ke-4, Lembar Negara Tahun 2002.

-----. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

-----. Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

-----. Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

-----. Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

-----. Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

-----. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

-----. Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.